

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini bertujuan menjelaskan kebijakan *Presidential Proclamation 9645 (PP 9645)* Donald Trump dalam memerangi terorisme. Hal tersebut penting diteliti untuk mengungkap alasan di balik kebijakan *PP 9645*. Riset ini diharapkan berkontribusi bagi ilmu kebijakan luar negeri mengenai isu keamanan non-tradisional. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dan alasan Trump mengeluarkan kebijakan tersebut.

Menarik diteliti karena kebijakan ini kontroversial dan menjadi bahan perdebatan oleh khalayak ramai. Hal ini terutama terjadi di kalangan pemerintahan dan masyarakat internasional. Kebijakan yang intoleran terhadap Muslim ini menuai kontra sejak dikeluarkan pada 2017 lalu. Selain itu, belum ada penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai penyebab pengambilan keputusan tersebut.

Amerika Serikat (AS) adalah negara yang memiliki sejarah kelam terkait terorisme. Pada tanggal 16 September 1920 terjadi aksi teroris pertama di New York. Hal ini terkait peledakan kereta kuda oleh bom dinamit dekat *Wall and Broad Streets*. Serangan ini mengakibatkan 40 korban tewas dan 300 korban luka-luka. Pemboman Kedutaan Besar AS di Tanzania dan Kenya pada tahun 1998. Peristiwa peledakan kapal *USS Cole* di perairan Yaman pada tahun 2000 (House

2003, 5). Pemboman *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 merupakan serangan teroris terbesar dalam sejarah AS.

Peristiwa ini diawali pembajakan pesawat sipil *American Airlines* dari Boston menuju Los Angeles oleh anggota Al Qaeda. Lalu, diarahkan untuk ditabrakkan ke puncak WTC sebelah utara di New York. Dilanjutkan pesawat *United Airlines* yang menabrak menara WTC sebelah selatan. Sehingga, menara kembar itu runtuh dan menelan korban sekitar 3.000 orang. Berikutnya, pesawat sipil ketiga yang dibajak teroris menabrak sayap kanan gedung Pentagon (Daulay 2009, 2). Pesawat keempat yang dikuasai pembajak diarahkan ke Gedung Putih dan Gedung Kongres. Namun, dapat dicegah dan pesawat mendarat darurat di sebuah ladang di Pennsylvania (Oren 2007, 582).

Peristiwa itu merupakan sejarah serangan teroris terbesar. Melihat jumlah korban jiwa dan dampak psikologis bagi warga AS dan dunia. Peristiwa 11 September 2001 atau 9/11 (Daulay 2009, 1), melandasi perubahan perilaku AS dalam memaknai terorisme (Muller-Fahrenheit 2007, 94). Presiden George W. Bush segera merespon dengan mendeklarasikan “*Global War on Terror*” (GWOT) dalam pidato 20 September 2001 (Williams 2008, 171).

Peristiwa 9/11 menjadikan kebijakan anti teror sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas keamanan AS. Hal ini dimulai sejak pemerintahan Presiden AS saat peristiwa 9/11, yaitu George W. Bush. Bush memerintahkan invasi militer AS ke Afganistan dan Irak, karena dituding mensponsori Al Qaeda.

Dilanjutkan Presiden Barack Obama dengan kebijakan *drone* untuk menumpas teroris. Obama berhasil membunuh pemimpin Al Qaeda, Osama Bin

Laden melalui misi pasukan militer khusus pada 2011 lalu. Presiden AS kini, Donald Trump yang menumpas mayoritas anggota ISIS dan melemahkan kekuasaannya di Irak dan Suriah. Ketiga Presiden AS itu sama-sama memiliki kebijakan untuk memerangi terorisme dalam sistem pemerintahannya.

Masa kepemimpinan Bush dikenal dengan kebijakan anti teror yang bersifat agresif. Bush cenderung menggunakan kapabilitas militer. Bush mengatakan bahwa AS akan memberantas semua kelompok teroris. Bush menyerukan seluruh negara melawan aksi teror (*with us*) atau berpihak pada teroris (*against us*) (Koshy 2002, 7). Kebijakan Bush membagi dunia menjadi dua, yaitu kelompok teroris dan kelompok kontra teroris.

Dalam pengambilan keputusan *pasca* 9/11, Bush dianggap melakukan politisasi agama. Ia mengatakan bahwa perang melawan teror adalah perang salib di era modern. Ia juga menyebut beberapa negara, seperti Irak, Iran, dan Korea Utara sebagai “*Axis of Evil*” (Weeks 2010, 122).

Strategi kebijakan anti teror Bush adalah *pre-emptive*, menurut *The National Security Strategy of The USA (The White House, 2002)*. Berguna mencegah penyerangan yang mengancam stabilitas keamanan AS dan global di masa mendatang (Weeks 2010, 45). Hal ini melandasi perang AS terhadap kelompok Taliban di Afganistan. Taliban dituding mendukung Al Qaeda, yaitu kelompok yang mendalangi tragedi 9/11. Invasi AS terhadap Irak, yang dituduh terkait Osama Bin Laden dan isu kepemilikan WMD. Namun dikecam oleh komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Masa pemerintahan Presiden Barack Obama dikenal dengan kebijakan *smart power*, melalui instrumen diplomasi. AS memberikan kesempatan bagi negara-negara lain untuk menggunakan kapabilitas militer dan strategi kebijakan domestik. Dalam melawan terorisme di wilayahnya masing-masing. Sedangkan, AS berupaya untuk memberikan bantuan dana, teknologi, serta persenjataan militer yang diperlukan. Obama juga menyatakan dukungannya terhadap pemerintah negara di kawasan Timur Tengah (Widmaier 2015, 2-3). Obama berusaha memperbaiki citra buruk AS dalam pandangan negara-negara Islam di Timur Tengah. Obama juga meningkatkan kerja sama bilateral dalam memberantas terorisme dengan negara tersebut.

Presiden Obama memprioritaskan pencegahan liberalisme agama dan intervensi negara lain, serta keseimbangan kekuatan di dunia (Widmaier 2015, 105). Upaya Obama memerangi teroris disebut "*countering violent extremism*", yaitu perlawanan terhadap kekerasan kaum ekstrimis. Ia menghindari sebutan teroris Islam, karena teroris dianggap tidak beragama.

Pakistan yang sebelumnya aliansi AS, berubah menjadi ancaman menurut Obama. Oleh karena dianggap ragu bekerja sama dengan AS dalam membunuh Osama Bin Laden. Ia terkenal dengan program pengembangan *drone* dalam skala besar (Krieg 2016, 99) untuk membunuh para teroris. Strategi kebijakan Obama adalah memberantas teroris hingga ke akarnya, dengan memburu pemimpinnya. Hal ini berhasil diwujudkannya setelah membunuh Osama Bin Laden pada 2011 lalu (Hoffman 2009).

Masa administrasi Donald Trump dengan slogan *America First*, dikenal dengan kebijakan anti terornya yang kontroversial. Kebijakan itu menuai kecaman, karena diskriminatif terhadap kaum Muslim. Kebijakan tersebut direfleksikan melalui *National Strategy for Counterterrorism 2018*. Isinya, menempatkan Amerika sebagai yang utama. Menekankan perlindungan bagi warga AS melalui pembangunan perbatasan negara yang lebih kokoh. Memperketat keamanan pintu masuk ke Negara AS. Melindungi infrastruktur dan fasilitas yang berguna untuk memberantas aksi teror (Trump 2018, 1).

Trump memiliki gaya kebijakan berbeda dari Presiden AS sebelumnya dan lebih ekstrim. Kebijakan anti teror imigrasinya adalah yang paling terkenal. Sebagai bentuk realisasi Trump untuk mencegah terorisme di AS, yaitu kebijakan imigrasi dan perbatasan wilayah. Contohnya, kebijakan pembangunan tembok Meksiko untuk mencegah masuknya imigran yang dianggap ancaman keamanan. Terkait narkoba, mafia, terorisme dan lainnya.

PP 9645 yaitu larangan masuknya warga dari beberapa negara Muslim untuk memasuki AS, karena diduga terkait aktivitas terorisme. Trump mengasumsikan penyebab dari aksi teror adalah akibat lemahnya pemerintah negara menjaga perbatasan negara. Mereka dinilai membiarkan para anggota teroris radikal dari luar masuk ke wilayah negaranya. Kebijakan *PP 9645* merupakan kebijakan yang menyerukan pemeriksaan menyeluruh bagi para imigran dan memberlakukan *travel ban* dari beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim (Allen 2017).

Kebijakan larangan imigran ini awalnya dikeluarkan Trump pada 27 Januari 2017, bernama “*Executive Order 13769*” untuk melindungi bangsa dari teroris asing yang hendak masuk ke AS. Kebijakan itu menunda masuknya warga Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, Yaman selama 90 hari sebagai turis dan 120 hari bagi pengajuan pengungsi (House 2017). Namun pada 6 Maret 2017, perintah eksekutif tersebut direvisi dengan Irak dikeluarkan dari daftar negara yang dilarang. Setelah pemerintah Irak mengatur prosedur *screening* visa secara lebih ketat dan meningkatkan pembagian informasi terorisme dengan AS.

Banyak kalangan mengkritik Trump dengan menyebut kebijakan itu sebagai pencerminan sikap anti-Islam. Bahkan, tidak akan menghentikan aksi kekerasan di AS yang dilakukan oleh warga kelahiran AS (Utomo 2018). MA pada 26 Juni 2018 memutuskan daftar negara yang terkena kebijakan *PP 9645* ini. Daftar itu terdiri atas Iran, Libya, Suriah, Somalia, Yaman, Korea Utara dan Venezuela. Meskipun demikian, kebijakan *PP 9645* Trump, tetap mendapat kecaman dari komunitas internasional. Mereka menganggap kebijakan itu bersifat rasis dan diskriminatif terhadap warga Muslim di dunia.

Kritikan sikap rasis ini, berlanjut ketika Trump tidak ragu menggunakan istilah *Countering Radical Islamic Extremism*. Artinya, perlawanan terhadap kaum Islam radikal ekstrimis dalam menyebut perjuangannya melawan aksi teror. Sehingga, semakin meningkatkan kesan ketidak-sukaan Trump terhadap warga Muslim.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian; Mengapa Donald Trump mengeluarkan kebijakan *PP 9645* dalam memerangi terorisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Menjelaskan alasan Trump mengeluarkan kebijakan *PP 9645* dalam memerangi terorisme.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu mengenai pengambilan keputusan Trump. Khususnya, dalam *PP 9645* yang dianggapnya sebagai cara efektif mencegah masuknya teroris ke wilayah AS. Lalu, mengaitkannya dengan teori dan konsep dalam ilmu hubungan internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis yang hendak dicapai, yaitu:

- (1) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan referensi berguna dalam ilmu hubungan internasional. Tujuannya menjelaskan implementasi kebijakan anti teror AS terkini pada masa pemerintahan Donald Trump

- (2) Penelitian ini diharapkan berguna dalam mempelajari tanggapan seorang kepala negara *super power* di dunia. Terutama dalam situasi ancaman keamanan internasional yang dinamis, terkait isu terorisme yang dinamis dan sedang berlangsung
- (3) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan luar negeri di Indonesia. Terutama, dalam merumuskan strategi kebijakan anti teror di Indonesia saat ini. Berkaitan penerapan kebijakan anti teror di negara besar, seperti Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump saat ini.

1.5 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif menganggap kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan melalui penelaahan terhadap individu melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim 2002). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Pada bagian ini, peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono 2005). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis subjek kebijakan luar negeri *PP 9645 AS* dalam upaya memerangi terorisme. Dikeluarkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebijakan *PP 9645* ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Casel dan Simon mengatakan metode penelitian ilmu sosial berusaha memberikan deskripsi dan interpretasi secara akurat mengenai makna dari gejala yang terjadi dalam konteks sosial. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis atau terucap dan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi yang dipelajari peneliti (Simon 1994, 3-4). Penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena yang dialami objek penelitian dengan cara deskripsi. Dalam bentuk kata-kata dan bahasa, agar dapat memperoleh generalisasi yang rasional (Moleong 2014, 5-6).

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format *grounded research*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan format deskriptif. Yaitu penelitian yang menggambarkan dengan meneliti sebab akibat mengenai individu atau kelompok tertentu berkaitan keadaan yang terjadi (Koentjaraningrat 1993, 89). Hal ini sesuai yang dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti berusaha untuk menjelaskan mengenai penyebab yang mempengaruhi pengambilan keputusan *PP 9645* oleh Donald Trump.

1.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan data primer dan sekunder dalam meneliti objek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data

pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek riset, ataupun para pakar ahli yang meneliti bidang penelitian (Kriyantoro 2006, 41). Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian. Ataupun dari pihak lain yang terkait dengan objek yang diteliti. Data ini bisa diperoleh dari studi pustaka berupa sumber tertulis seperti buku, referensi, dokumen, dan sebagainya (Akbar 2009).

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab. Sehingga, dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2005, 72). Teknik pengumpulan data ini sangat berguna, karena peneliti dapat mengolah data secara mendalam. Sehingga diharapkan data yang didapat lebih akurat.

Wawancara semi terstruktur termasuk kedalam kategori *indepth interview*. Teknik wawancara ini pada pelaksanaannya lebih bebas, bila dibandingkan teknik lainnya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono 2005, 73). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua narasumber pakar kebijakan (Diplomat) dari Direktorat Amerika di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen yang dibuat subjek sendiri atau orang lain. Dokumentasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek. Melalui suatu media dan dokumen tertulis lainnya dibuat oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah 2010, 143). Metode dokumentasi menggunakan data berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, laporan, foto, gambar, dan lainnya (Sugiyono 2005). Terutama, mengenai berbagai peristiwa yang terjadi berkaitan kebijakan *PP 9645* yang dikeluarkan Donald Trump. Serta, faktor yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut dari berbagai sumber tertulis yang diperoleh peneliti.

1.5.4 Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperoleh peneliti dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah dengan menganalisa atau mengolah data yang ada tersebut. Adapun teknik yang digunakan, yaitu:

1. Seleksi data, yang berguna untuk mengetahui kekurangan dalam proses pengumpulan data. Memeriksa kesesuaian data dengan pokok bahasan.
2. Klarifikasi data, di mana data yang diperoleh dikumpulkan ke pokok bahasan yang telah ditetapkan. Data tersebut masing-masing dikelompokkan dalam bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, ataupun hasil pembahasan.

3. Penyusunan data, yaitu menetapkan data pada tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan. Setelah diseleksi, data disusun secara sistematis dan dimasukkan ke dalam pokok bahasan masing-masing. Kemudian, dianalisa untuk mendapatkan gambaran mengenai tujuan penelitian yang dilakukan (Prasetyo 2016).

1.5.5 Metode Validasi Data

Validitas merupakan keakuratan antara data pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono 2011, 117). Cara uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas (uji validitas internal). Uji kredibilitas adalah cara pengujian untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada beberapa cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu:

1. Peningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Tujuannya agar kepastian data dan urutan peristiwa dapat diketahui secara pasti dan sistematis. Hal ini penting untuk memahami secara jelas kronologis pengambilan keputusan dalam kebijakan *PP 9645* oleh Donald Trump. Sejak *Executive Order 13769* pertama pada Januari 2017 dan dua revisi sesudahnya.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah cara menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini dilakukan dengan cara menguji data dari beberapa sumber berbeda.

Membandingkan antara suatu sumber dengan sumber lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar data yang digunakan peneliti adalah benar dan akurat. Lalu, harus sesuai fakta dan terbukti melalui kesamaan data dari berbagai sumber dan penulis berbeda. Mengenai suatu topik yang sama, yaitu *PP 9645* yang diteliti.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono 2005, 122). Seperti dalam penelitian ini, hipotesa peneliti berkaitan penyebab keputusan *PP 9645* didukung oleh data tabel, gambar, dan grafik. Seperti opini warga domestik AS terhadap imigran Muslim, peningkatan anggaran pertahanan *counterterrorism* non militer AS semasa Donald Trump, kerugian ekonomi akibat terorisme di AS sejak 2001, peningkatan jumlah serangan terorisme global. Guna mendukung atau memperkuat kebenaran asumsi peneliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Setelah Bab Pertama ini, Bab Kedua akan dijelaskan kajian pustaka yang terdiri dari; tinjauan pustaka, kerangka teoritis atau konseptual, kerangka pemikiran, dan hipotesa. Bab ketiga akan menunjukkan temuan penelitian. Di antaranya adalah tragedi WTC 11 September 2001, dampak WTC terhadap AS dan keamanan global, kenaikan Donald Trump, kebijakan anti teror Trump, kebijakan *PP 9645* Trump, dan faktor yang mempengaruhi kebijakan *PP 9645* Trump. Yaitu, dalam bidang politik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Skripsi ini akan ditutup dengan Bab Keempat yang berisikan kesimpulan dan inferens yang dapat diperoleh dari temuan penelitian.